

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah mempengaruhi terhadap kemajuan ekonomi satu wilayah dengan memberi sebuah keleluasaan pada pemerintah itu sendiri untuk mengelola keuangan daerahnya. Dalam rangka pemberian otonomi daerah, tujuannya tidak lain untuk memberikan dampak yang positif pada kemajuan ekonomi pada masing-masing daerah tersebut. Otonomi daerah itu diberikan bukan hanya untuk mempertahankan keutuhan suatu bangsa dalam keberagaman juga tidak semata untuk memberikan otoritas pemerintahan baik itu dari pusat sampai ke daerah, tapi juga berkaitan dengan keikutsertaan masyarakat sistem pemerintah itu sendiri.

Otonomi daerah yang memiliki rasa tanggungjawab itu adalah otonomi yang pelaksanaannya wajib untuk benar-benar searah terhadap tujuan. Inti diberikannya suatu kedaulatan daerah ialah agar bisa mengelola suatu daerah termasuk memberikan rasa sejahtera bagi masyarakat dan itulah tujuan yang paling utama dari tujuan negara. Abdurrachman (1987:11) juga mengemukakan pendapatnya tentang otonomi daerah sebagai kebebasan agar mempertanggungkan kebutuhan dalam daerah, menggunakan *financial* tersendiri, menetapkan hukum daerah itu sendiri dan pemerintahan tersendiri (Engkus, 2017).

Otonomi daerah salah satu bentuk perwujudannya yaitu adanya pengelolaan keuangan daerah. Konsekuensi yang rasional yang timbul dalam penerapan otonomi daerah itu yaitu dengan menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada daerah tersebut dengan *financial management* yang berdaya guna.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan memberikan dampak yang berguna untuk meningkatkan kemajuan daerah itu sendiri serta kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini terjadi, karena memanfaatkan bermacam-macam potensi daerah secara berdaya guna. Oleh karena itu *financial management* suatu daerah sangat harus dilihat. Hal inilah yang menentukan untuk menilai suatu daerah itu sudah mampu memanajemen keuangan daerahnya sesuai dengan peraturan/ketentuan yang sudah ditetapkan.

Regional financial management bisa dikatakan berhasil jika sudah mampu untuk mengatur dan mengelola dana desentralisasi yang ekonomis, transparan, efisien, efektif serta bisa bertanggungjawab terhadap masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah itu termasuk dalam keuangan negara, pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan seluruh aktivitas yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, serta pengawasan dalam keuangan daerah.

Isu penting yang sering dibahas dalam kinerja keuangan yang dikelola oleh pemerintah. faktor inilah yang menjadikan pemerintah diharuskan melakukan kerja dalam *financial* yang baik. Hal itu akan dilaporkan dalam pelaporan pertanggungjawaban untuk dapat dinilai, karena itulah dibutuhkannya pengukuran kinerja yang tujuannya tidak lain untuk melakukan penilaian terhadap kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri dalam mencapai tujuannya.

Saat ini, *public sector* diminta untuk memberikan perhatian terhadap mutu dan kompeten serta *value for money* terhadap kegiatan yang dilaksanakan. *Value for money* dijadikan sebagai pengukur *public sector organization*. Masalah-masalah yang kerap muncul pada pemerintah dalam hal mengukur kinerjanya ialah kesulitan dalam mengukur hasil, dikarenakan hasil yang ingin dicapai tidak melulu menghasilkan hasil yang berwujud, tetapi yang lebih sering muncul hasil yang tidak berwujud.

Sisi lain hal yang menjadi sektor dalam kemajuan suatu daerah yaitu perikanan. Karena perikanan menjadi sumber utama dari kekayaan alam yang dimiliki suatu daerah yang menjadi salah satu kemajuan suatu daerah tersebut. Jika Perikanan bisa memberikan dampak yang baik bagi ekonomi masyarakat maka dapat dikatakan pemerintah daerah dan masyarakatnya berhasil dalam memanfaatkan perikanan dengan berdaya guna dan berhasil guna dalam daerahnya.

Masyarakat berhak untuk mengetahui setiap kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya Dinas Perikanan

Kabupaten Pasaman Barat yang termasuk dalam salah satu *public sector organization* yang mempunyai peranan khusus untuk menciptakan sumber perikanan yang bermutu di Kabupaten Pasaman Barat. Dalam menciptakan perikanan yang bermutu tersebut maka Dinas Perikanan mempunyai beberapa program kerja serta aktivitas ataupun kegiatan yang sudah dilaksanakan. Karena itulah perlu dilakukannya pengukuran kinerja dengan menerapkan *Value For Money* yang tujuannya yaitu membuat ukuran kinerja berdasarkan ekonomis, efisiensi, dan juga efektivitas guna melihat bahwasanya program dan kegiatan yang ditentukan itu telah terlaksana dengan baik atau tidak, sesuai dengan tujuan organisasi tersebut.

Fungsi Organisasi juga akan dilihat dari pengendalian yang dilakukan oleh pegawai dalam menjalankan tugasnya, adanya tatanan organisasi yang sudah ada hingga pengendalian yang dilaksanakan oleh kepala organisasi tidak dilakukan secara langsung, yang tidak lain tujuan utamanya yaitu agar pegawai dalam organisasi bisa bekerja dengan baik dan bisa mencapai tujuan dari organisasi yang ingin dicapai.

Masyarakat berharap adanya tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah tentang penerapan *value for money* yaitu, hemat serta cermat artinya ekonomis terhadap alokasi sumber daya dan pengadaan, tepat guna (efisien dalam penggunaan sumber daya maksudnya yaitu penggunaannya dilakukan meminimalan namun hasil akan dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai sasaran dan tujuan.

Pasaman Barat merupakan satu dari tujuh wilayah yang memiliki daerah pesisir di Sumatera Barat dengan permasalahan yang masih terjadi yaitu tingkat kemiskinan yang masih tinggi, potensi ikan laut yang kurang optimal karena terbatasnya alat tangkap, belum maksimalnya investasi di bidang perikanan, dan lainnya. Harusnya kekayaan laut yang dimiliki itu harus dimanfaatkan, karena sektor perikanan yang dimiliki Kabupaten Pasaman Barat tersebut bisa dijadikan sebagai penunjang kemajuan perekonomian Pasaman Barat. Peran Dinas Perikanan inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat Pasaman Barat sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan serta lingkungannya. Sebagai organisasi sektor publik, Dinas Perikanan harus bisa memberikan hasil, keluaran serta dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat setempat, yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat tersebut.

Tabel 1. 1

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Kinerja Tahun 2019-2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2019	3.948.317.000	3.811.763.136	96,54%
2020	2.950.000.000	2.412.626.545	81,78%

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019-2020

Pada uraian rekapitulasi dan realisasi anggaran tahun 2019-2020 di atas, bisa dilihat bahwasanya pada tahun 2019 Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat memiliki anggaran yang cukup besar jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mengalami penurunan. Anggaran tahun 2020 justru

kurang optimal dan sangat jauh dari realisasi anggaran pada tahun 2019. Demikian bisa disimpulkan bahwa hasil persentase realisasi anggaran yang tidak mencapai target 100% yang bisa disebut bahwa anggaran yang diserap rendah yang mengakibatkan beberapa kegiatan/program masih belum terealisasi dengan baik. Terlihat bahwa perbandingan realisasi anggaran antara tahun 2019 dengan tahun 2020 yang mengalami penurunan maka karena itulah, hasil dari *Output* yang diharapkan sebelumnya tidak bisa sesuai dengan yang ditargetkan.

Adanya penyerapan rendah dan penurunan realisasi anggaran yang mengalami penurunan serta tidak mencapai target 100% tersebut, hal itu diperlukannya mengukur kinerja secara komprehensif terhadap, hasil, manfaat, juga keluaran yang bisa dirasakan dan dilihat oleh masyarakat, serta masyarakat juga bisa memperikarakan dampak dengan menggunakan *value for money* dalam pengukuran kinerja tersebut.

Tabel 1. 2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No	Sasaran strategis	Target Indikator or Kinerja Sasaran (<i>Output</i> Indikator)	Capaian Indikator Kinerja Sasaran (<i>Output</i>)				
			Sangat Baik (100% sd >100%) (Indikator)	Baik (90% sd <100%) (Indikator)	Cukup Baik (80% sd <90%) (Indikator)	Sedang (60% sd <100%) (Indikator)	Kurang/gagal (0% sd <60%) (Indikator)
2019							
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	112.464 Ton	-	105.981 Ton	-	-	-

	Tangkap						
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	6.694 Ton	-	6.224 Ton	-	-	-
3	Meningkatnya Persentase Olahan Ikan	20,75%	-	19,67%	-	-	-
4	Meningkatnya Konsumsi Ikan	33,90 Kg/kapita	-	33,90 Kg/kapita	-	-	-
Jumlah Produksi		119,158		112.205			
2020							
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	109.700 Ton	109.704 Ton	-	-	-	-
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	6.415 Ton	-	6.184 Ton	-	-	-
3	Meningkatnya Persentase Olahan Ikan	19,36%	19,67%	-	-	-	-
4	Meningkatnya Konsumsi Ikan	33,80 Kg/kapita	-	33,74 Kg/kapita	-	-	-
Jumlah Produksi		116.115	109.704	6.184			

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019-2020

Uraian indikator kinerja sasaran di atas bisa dilihat bahwa terdapat penurunan seluruh target indikator kinerja sasaran (*Output* Indikator) pada

tahun 2020 Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat. Tahun 2019 seluruh sasaran target strategis bisa menghasilkan *Output* dengan kategori indikatornya “sangat baik”, namun pada sasaran 2 dan 4 tahun 2020 mengalami penurunan capaian kinerja sasaran ke kategori indikator “baik”. Terlihat jelas bahwasanya tahun 2020 itu *Output* indikator sudah dilakukan penurunan namun jumlah produksi yang dihasilkan hanya 116.115 jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan jumlah produksi yang mencapai 119.158.

Adanya penurunan yang terjadi pada tahun 2020 pada Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat, bisa disebut bahwa tidak terjadinya peningkatan pada capaian indikator kinerja sasaran pada dinas terkait, yang harusnya pencapaian kinerja organisasi sektor publik naik atau bertambah setiap tahunnya yang mana bisa dijadikan sebagai perbandingan hasil capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, jika kinerja organisasi sektor publik hasilnya mengalami kenaikan maka kinerja organisasi itu lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan sebaliknya.

Berdasarkan hasil pra penelitian, peneliti menemukan permasalahan di Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat bahwa adanya penyerapan anggaran yang rendah pada tahun 2020 dan terjadinya penurunan realisasi anggaran pada tahun 2020 tersebut jika dibandingkan dengan tahun 2019. Kemudian, adanya penurunan seluruh target indikator kinerja sasaran (*Output* Indikator) pada tahun 2020 Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat, dan terjadinya penurunan pencapaian hasil sasaran 2 dan 4 tahun 2020, serta

jumlah produksi yang juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Dan untuk itu penelitian ini akan dilakukan untuk bisa mengetahui kinerja keuangan dalam Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan *Value For Money*. Untuk lebih jelasnya tertuang pada LAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2019-2020.

Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penerapan *Value For Money* Pada Pengukuran Kinerja-Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019-2020”**

B. Identifikasi Masalah

1. Adanya penyerapan anggaran yang rendah pada tahun 2020 serta terjadinya penurunan realisasi anggaran pada tahun 2020 tersebut jika dibandingkan dengan tahun 2019.
2. Adanya penurunan seluruh target indikator kinerja sasaran (*Output Indikator*) pada tahun 2020 Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat, serta terjadinya penurunan pencapaian hasil sasaran 2 dan 4 tahun 2020, serta jumlah produksi yang juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kinerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2019-2020 dengan menerapkan *value for money* berdasarkan segi ekonomis?

2. Bagaimana Kinerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2019-2020 dengan menerapkan *value for money* berdasarkan segi efisiensi?
3. Bagaimana Kinerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2019-2020 dengan menerapkan *value for money* segi efektivitas?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat untuk memperbaiki kinerja yang belum mencapai target yang sudah ditentukan sebelumnya?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hasil kinerja Dinas Kabupaten Pasaman Barat tahun 2019-2020 berdasarkan *value for money* dari segi ekonomis
2. Untuk mengetahui hasil kinerja Dinas Kabupaten Pasaman Barat tahun 2019-2020 berdasarkan *value for money* dari segi efisien
3. Untuk mengetahui hasil kinerja Dinas Kabupaten Pasaman Barat tahun 2019-2020 berdasarkan *value for money* dari segi efektivitas
4. Untuk mengetahui bagaimana apa saja yang menjadi kendala dan hambatan dalam pengukuran kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2019-2020 berdasarkan *value for money* serta upaya yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat

E. Manfaat Hasil Penelitian

Dari penelitian ini diharap bisa memberi kegunaan atau manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Memberi sumbangan dalam hal mengembangkan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang administrasi publik sektor keuangan publik yang berikatan dengan penerapan *value for money* pada pengukuran kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dijadikan sebagai syarat memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Instansi

Untuk bahan sumbangan serta pemikiran bagi pihak berkaitan untuk memperbaiki kinerja berbasis *value for money* agar bisa mengetahui lagi bagaimana langkah yang dilakukan agar dalam dinas terkait bisa mengelola keuangannya agar ekonomis, efisien, dan efektivitas

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil dari penelitian ini peneliti berharap bisa dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dengan pembahasan yang sama dan penelitian ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan serta

memberikan referensi dan fenomena bagi peneliti berikutnya untuk mengungkapkan bagaimana pengukuran kinerja berdasarkan *value for money* pada dinas-dinas yang akan diteliti.

F. Kerangka Pemikiran

Hal yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu Pengukuran Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat dengan menerapkan *value for money*. Pengukuran kinerja berbasis *value for money* dalam (Mahmudi, 2015) yaitu mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pada setiap kegiatan, program yang dilakukan. Dan *value for money* ini merupakan adanya penghargaan atas nilai uang. *Value for money* ialah konsep dalam mengelola *public sector organization* yang mementingkan penghargaan atas setiap rupiah uang publik dengan cara memanfaatkan secara *economical, efficiency, and effectiveness* (ekonomis, efisien, dan efektif). *Value for money* mempunyai tiga prinsip yaitu sebagai berikut :

1. Ekonomi

Ekonomi itu berkaitan dengan penggunaan *Input primer* yaitu anggaran atau kas menjadikan *Input sekunder* yaitu tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal yang dipakai dalam melakukan aktivitas operasi suatu organisasi. Ekonomi ini merupakan konsep yang berkaitan dalam hal menghemat anggaran agar mendapatkan masukan/*Input*. Konsep dari ekonomi ini mengharapkan agar *public sector organization* untuk tidak melakukan pemborosan anggaran dalam melaksanakan program, aktivitas dan *organization operational*.

Arti lain dari ekonomi ini yaitu bahwasanya sumber daya *Input* harusnya didapatkan secara hemat dengan memperoleh harga yang sangat rendah (*spending less*) ataupun sangat murah dengan mutu tertentu. Kehematan harga ini sering diukur dengan harga pasar. Jadi ekonomi ini ialah perbandingan antara masukan dengan anggaran (nilai Rupiah).

2. Efisiensi

Efficiency/efisiensi merupakan keterkaitan antara keluaran/*Output* yaitu barang atau jasa yang diwujudkan dengan sumber daya yang dipergunakan untuk mewujudkan keluaran/*Output* tersebut. Dari sisi matematik, *efficiency/efisiensi* itu ialah suatu perbandingan keluaran/*Output* dengan masukan/*Input* dalam arti lain keluaran/*Output* per unit masukan/*Input*. Efisiensi ini sam halnya dengan aktivitas produktif/produktivitas. Sebuah organisasi, program, atau aktivitas disebut efisien jika bisa mewujudkan keluaran/*Output* tertentu dengan masukan/*Input* sekecil-kecilnya, ataupun masukan/*Input* tertentu bisa mewujudkan keluaran/*Output* sebesar-besarnya. *Efficiency/efisiensi* ialah pembelanjaan anggaran secara cermat *spending well* (pembelanjaan anggaran secara cermat).

3. Efektivitas

Effectiveness/Efektivitas ialah perbandingan antara target (hasil yang hendak dicapai) dengan hasil yang sudah dicapai. Target atau hasil yang hendak dicapai ini ialah *Outcome* sedangkan hasil yang dicapai

merupakan *Output*. *Effectiveness*/Efektivitas memiliki fokus pada *Outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau aktivitas bisa dinilai efektif jika keluaran/*Output* yang sudah diwujudkan atau dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang dikehendaki dalam arti lain anggaran sudah dipergunakan secara tepat (*spending wisely*).



Gambar 1. 1
Kerangka Pemikiran

